



Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Real Estate Terhadap Tingkat Serapan Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2014

Mus Muallim¹, Sarce Babra Awom¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Papua

Received: Januari 2019; Accepted: Februari 2019; Published: Maret 2019

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, sektor infrastruktur dan sektor real estate terhadap serapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data angkatan kerja di kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat, data ijazah terakhir usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua barat 2010-2014, data PDRB atas dasar harga konstan sektor infrastruktur (konstruksi, transportasi dan pergudangan) dan data PDRB atas dasar harga konstan sektor real estate. Menggunakan analisis regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan sektor infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap angka serapan tenaga kerja. Selanjutnya sektor real estate berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka serapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat.

Kata kunci: serapan tenaga kerja, tingkat pendidikan, sektor infrastruktur, sektor real estate.

Abstract

This study intends to analyze the influence of education level, infrastructure sector and real estate sector on labor absorption in West Papua Province. The data used in this study are secondary data, namely labor force data in districts and cities in West Papua Province, recent diploma data aged 15 years and over in West Papua Province 2010-2014, GRDP data on the basis of the constant price of the infrastructure sector (construction, transportation and warehousing) and GRDP data on the basis of the constant price of the real estate sector. Using panel data regression analysis, the results of this study indicate that the level of education and the infrastructure sector have a positive but not significant effect on labor absorption rates. Furthermore, the real estate sector has a positive and significant effect on labor absorption rates in West Papua Province

Keywords: labor absorption, education level, infrastructure sector, real estate sector

How to Cite: Muallim, M., Awom, S. B. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Real Estate Terhadap Tingkat Serapan Tenaga Kerja di Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2014. *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2 (1), 12 – 21

✉ Corresponding author :
E-mail: alim.fekon@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang selalu ada di setiap negara di dunia ini, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Menurut Kuntiarti (2017) pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Tingginya tingkat pengangguran di suatu negara dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui apakah tingkat prekonomian mengalami peningkatan atau mengalami penurunan.

Indonesia adalah negara yang dikategorikan sebagai negara yang sedang berkembang, oleh karenanya Indonesia tak luput dari permasalahan pengangguran. Pengertian pengangguran terbuka menurut Sukirno (2013) adalah pengangguran akibat jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja. Minimnya kesempatan kerja yang tersedia sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, lesunya pembangunan sektor industri dan berbagai faktor penyebab lainnya. Dampak yang diakibatkan

dari tingkat pengangguran yang tinggi sangat mengkhawatirkan seperti yang diungkapkan Kuntiarti (2017) bahwa tingginya pengangguran terbuka akan membawa dampak pada penurunan produktivitas dan daya beli masyarakat, kemiskinan, kriminalitas, serta masalah sosial lainnya yang tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik.

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam mengarahkan aktifitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas negara, pemerataan distribusi pendapatan, dan peningkatan kesempatan kerja (Dornbusch, Fisher, & Staetz, 2008).

Papua Barat merupakan provinsi yang terletak di pulau Papua selain Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat terbagi, menjadi 12 kabupaten dan satu kota. Permasalahan pengangguran dan serapan tenaga kerja tidak luput dialami Provinsi Papua Barat. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dapat diketahui jenis kegiatan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Tahun 2013-2014 (Jiwa)

Jenis Kegiatan Utama	2013			2014		
	Jenis Kegiatan Utama (Jiwa)			Jenis Kegiatan Utama (Jiwa)		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1 Penduduk Usia Kerja/ (15+)	15.431	13.109	28.540	15.914	13.711	29.625
2 Angkatan Kerja	12.778	5.875	18.833	13.069	6.351	19.420
a. Bekerja	12.322	5.875	18.197	12.703	6.048	18.751
b. Pengangguran Terbuka	456	180	636	366	303	669
3 Bukan Angkatan Kerja	2.653	7.054	9.707	2.845	7.360	10.205
a. Sekolah	1.950	1.260	3.210	2.553	1.690	4.243
b. Mengurus Rumah Tangga	30	5.309	5.339	69	5.236	5.305
c. Lainnya	656	523	1.179	223	434	657

Sumber : BPS Papua Barat, 2016

Dari Tabel 1. dapat dilihat khususnya pada kegiatan utama bekerja dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatan serta jumlah pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat dapat dipengaruhi berbagai faktor diantaranya faktor tingkat pendidikan. Menurut Aji (2016) di negara berkembang, pengangguran sangat berkaitan dengan masalah pendidikan, antara lain pada mutu pendidikan, kesiapan tenaga pendidik, fasilitas dan pandangan masyarakat. Pada masyarakat yang sedang berkembang, tingkat pendidikan memiliki peran penting yang

berguna sebagai peningkat kesejahteraan dan daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan tingkat pendidikan yang baik, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat pula.

Penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari pengaruh pembangunan di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat penting, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri mengatakan bahwa pemerintah harus melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur secara serentak guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa lebih cepat (Andrian, 2009 dalam Wibowo dan Pujiati,

2011). Dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Infrastruktur yang dimaksud disini meliputi tiga sektor yaitu sektor konstruksi, transportasi dan sektor perdagangan. Capaian hasil pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya dalam perekonomian akan menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu sektor yang mendapatkan manfaat dari kualitasnya kondisi infrastruktur adalah usaha di bidang properti (pengembang perumahan) terutama pada perumahan mewah atau *real estate*. Infrastruktur yang baik akan merangsang investor untuk berinvestasi di bidang ini, karena dengan infrastruktur yang baik diharapkan mampu menjadikan *real estate* bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga baik untuk pengembang, investor, maupun masyarakat dapat merasakan manfaat dari infrastruktur yang berkualitas (Grahandaka, 2010 dalam Wibowo dan Pujiati, 2011). Dengan banyaknya investor yang datang untuk berbisnis di bidang *real estate* maka akan banyak berdampak terciptanya lapangan pekerjaan khususnya bagi tenaga kerja bangunan, tenaga arsitek, tenaga pengawas, tenaga keamanan dan lain-lain.

Pengangguran

Sukirno (2013) selanjutnya menjelaskan pengangguran berdasarkan penyebabnya antara lain pengangguran friksional yaitu pengangguran yang disebabkan karena sedang proses mencari pekerjaan. Selanjutnya pengangguran siklikal yaitu pengangguran yang terjadi akibat naik turunnya siklus ekonomi yaitu ada saat permintaan agregat tinggi dan ada saat permintaan agregat turun. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi. Terakhir, pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan mesin sehingga manusia tidak lagi dibutuhkan dalam proses produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran sangat beragam. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di suatu negara adalah pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kurangnya keterampilan, kurangnya lapangan kerja, kurangnya informasi, inflasi, investasi, upah minimum, dan jumlah penduduk. Masalah kesempatan kerja atau pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit dihindari oleh suatu negara atau daerah dan dapat menimbulkan masalah sosial seperti tindakan

ke kriminalitas dan masalah ekonomi (Qomariah, 2013).

Penyerapan Tenaga Kerja

Wahyudi (2004) mengemukakan bahwa penyerapan tenaga kerja adalah ditermannya para pelaku kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersediannya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk di isi oleh para pencari kerja. Penyerapan tenaga kerja biasa dikaitkan dengan keseimbangan interaksi antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, dimana pasar permintaan tenaga kerja dan pasar penawaran tenaga kerja secara bersama menentukan suatu keseimbangan tingkat upah dan keseimbangan penggunaan tenaga kerja.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pendidikan di Indonesia dapat dibedakan sesuai jalurnya antara lain pendidikan formal (pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi), pendidikan nonformal (jalur pendidikan di luar pendidikan formal) dan pendidikan informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan). Pendidikan sangatlah bermanfaat semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mempermudah seseorang dalam mencari pekerjaan, dan tingkat pendapatan yang akan seseorang peroleh akan lebih besar. Seperti yang dikemukakan Aji (2016) menempuh pendidikan yang lebih tinggi merupakan sebuah investasi dimana seseorang rela membayar "*direct cost*" dan "*opportunity cost*" (pendapatan yang harus dilepaskan dari bekerja) untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Teori Human Capital

Menurut Becker (dalam Atmanti, 2005) *human capital* adalah bahwa manusia bukan sekadar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Menurut Davenport (dalam Atmanti, 2005) *human capital* sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. Termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu. Pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan mempengaruhi distribusi pendapatan perekonomian di suatu negara (Becker, 1964; Schultz, 1981 dalam Dian Satria, 2008). Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*). Romer (1986) dan Lucas (1988) dalam Satria (2008) menjelaskan bahwa modal manusia tidak hanya diidentifikasi sebagai kontributor kunci dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, namun juga mendorong tujuan pembangunan untuk meningkatkan *human freedom* secara umum. Selain itu, fokus dalam perkembangan global saat ini yang dicatat dalam *millennium development goals* juga telah memposisikan perbaikan kualitas modal manusia dalam prioritas yang utama.

Sektor Infrastruktur

Definisi dan penggolongan infrastruktur menurut *MacMillan Dictionary of Modern Economics* (1996) menjelaskan bahwa infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) memberikan pengertian yang lebih luas bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur dapat digolongkan dalam beberapa bentuk yakni infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur telepon, dan infrastruktur air bersih.

Sektor Real Estate

Real estate maupun *property* memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya. Namun, belakangan ini di masyarakat telah terjadi pergeseran arti, *real estate* lebih diartikan sebagai suatu kompleks perumahan yang memiliki lingkungan yang terkesan tertata rapi. Jika kita menyebut kata *real estate*, maka masyarakat umumnya akan membayangkan suatu kawasan perumahan yang luas dan indah, contohnya adalah kawasan Bumi Marina Asri dan perumahan subsidi di Sowi Gunung Manokwari. Sedangkan sektor *property* pengertiannya lebih mengarah kepada suatu bangunan atau kompleks bangunan, sebuah rumah mewah dengan halaman seluas ratusan bahkan ribuan meter dengan harga milyaran rupiah, atau sebuah ruko 4 sampai 6 lantai, atau sebuah gedung perkantoran yang memiliki 10 lantai, atau sebuah kompleks *mal*, *tradedcenter* dan apartemen atau sebuah kompleks *resort* hotel, dan lain-lain. Sehingga pengertian *property* sendiri lebih diartikan sebagai suatu bangunan yang lebih banyak pada komposisi bangunannya itu sendiri dibanding tanahnya.

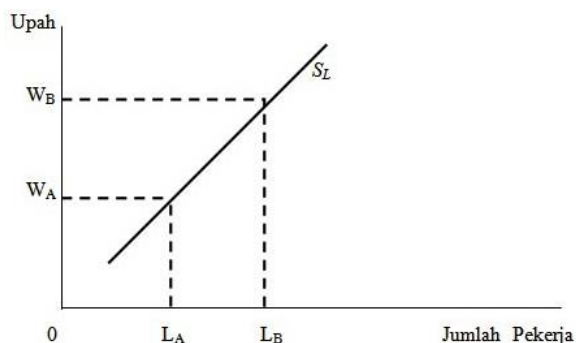
Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja (Maulida dkk, 2014).

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2002), bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama

investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Penawaran tenaga kerja dapat diartikan sebagai penyediaan tenaga kerja. Menurut Simanjuntak (2005 dalam Wibowo dan Pujiati, 2011), penyediaan tenaga kerja adalah jumlah usaha atau jasa kerja yang tersedia dalam masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa. Penawaran tenaga kerja juga dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja. Menurut Gilarso (1994) pertimbangan penting yang harus diperhatikan bagi para pencari kerja adalah upah yang cukup untuk menjamin penghidupan yang layak sehingga kemakmuran akan tercapai, sedangkan bagi para produsen adalah prestasi kerja atau produktivitas yang diutamakan.

Mankiw (2012) menyatakan bahwa fungsi penawaran tenaga kerja menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh para pencari kerja dengan tingkat upah yang diajukan oleh perusahaan memiliki hubungan positif. Hal ini berarti apabila upah naik, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan para pencari kerja akan naik. Sebaliknya, apabila upah turun, maka jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh pencari kerja akan menurun dengan sendirinya. Gambar 2.2 menunjukkan kurva penawaran tenaga kerja, dimana W yaitu upah, L tenaga kerja, dan S penawaran tenaga kerja.



Sumber: Mankiw, 2012

Gambar 1. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

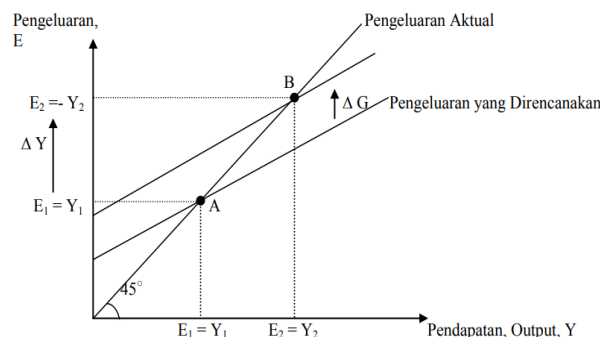
Instrumen pengeluaran pemerintah merupakan salah satu dari beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan Investasi merupakan kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif, yang diharapkan dapat berdampak meningkatnya pendapatan nasional. Hal ini sesuai dengan persamaan identitas

pendapatan nasional, dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dan pembangunan infrastruktur adalah pengeluaran pemerintah (G) dan pembangunan real estate adalah investasi (I). Identitas keseimbangan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dimana:

- Y = pendapatan nasional (GDP)
- C = konsumsi
- G = pengeluaran pemerintah
- x = ekspor
- m = impor



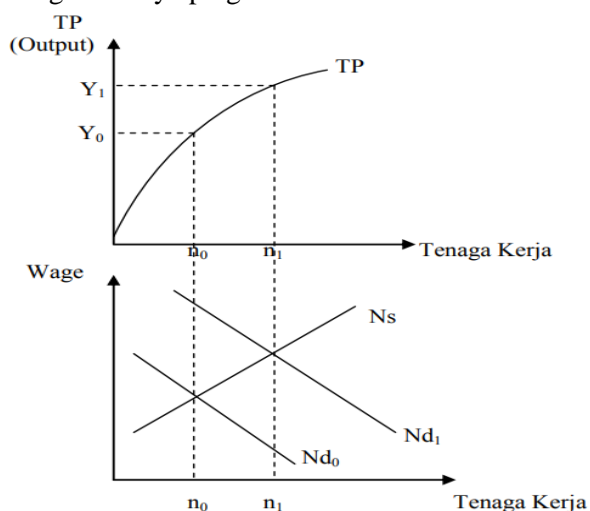
Sumber: Mankiw, 2003

Gambar 2. Kenaikan Belanja Pemerintah dalam Perpotongan Keynesian

Kenaikan belanja pemerintah sebesar ΔG meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y_1 ke Y_2 . Kenaikan dalam pendapatan ΔY melebihi kenaikan belanja pemerintah, sehingga kebijakan fiskal ini memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan. Pendapatan yang lebih tinggi menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, pada harga yang lama, perusahaan mampu menjual lebih banyak *output*. Oleh karena itu, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran (Mankiw, 2013). Kenaikan pada pendapatan nasional akan menyebabkan pertumbuhan *output* dan akan meningkatkan kesempatan kerja (Gambar 2.4). Melalui kurva fungsi produksi, peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja (dari n_0 ke n_1) membuat jumlah *output* bertambah (dari Y_0 ke Y_1). Kurva fungsi produksi yang tidak linier menandakan bahwa persentase pertumbuhan *output* di atas proposional dari persentase

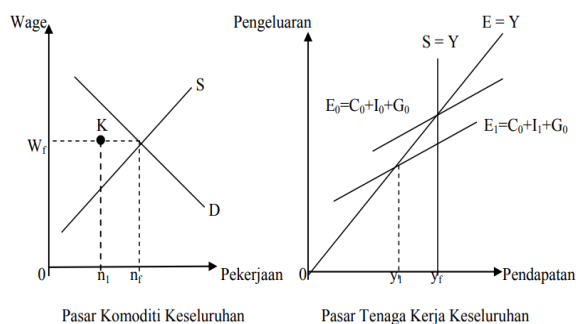
penambahan tenaga kerja (*increasing return to scale*). Ini berarti bahwa peningkatan tidak hanya terjadi pada sisi jumlah tenaga kerja, tetapi juga pada sisi produktivitas.

Sudut dari kurva fungsi produksi tersebut yang merupakan marginal produk dari tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi yang menentukan berapa banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk membuat satu atau sejumlah *output* dengan adanya pergeseran kurva *Nd* ke kanan.



Sumber: Muslikhah, 2008

Gambar 3. Fungsi Produksi dan Pasar Tenaga Kerja
 Penurunan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur setelah krisis berakibat pada penurunan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada. Kondisi infrastruktur yang menurun tersebut merupakan salah satu alasan investor memindahkan investasi dari Indonesia (Zetha dan Tambunan, 2006). Penurunan investasi menyebabkan jumlah penganggur mengalami peningkatan karena berkurangnya kesempatan kerja (Gambar 2.6).



Sumber: Bellante dan Jackson, 1990

Gambar 4. Peningkatan Pengangguran Akibat Penurunan Investasi

Pada pasar komoditi agregat, permintaan nyata agregat pada mulanya adalah $E_0 = C_0 + I_0 + G_0$; penawaran nyata agregat merupakan garis

vertikal $S = Y$ (pada tingkat pengangguran alamiah). Permintaan nyata agregat dalam hubungan dengan penawaran nyata agregat, menghasilkan suatu tingkat pendapatan keseimbangan y_f . Dalam seluruh pasar tenaga kerja, seluruh permintaan dan penawaran tenaga kerja menghasilkan suatu upah nyata keseimbangan W_f dan penggunaan tenaga kerja penuh n_f . Apabila permintaan agregat jatuh pada $E_1 = C_0 + I_1 + G_0$ disebabkan adanya penurunan pada investasi agregat, maka tingkat pendapatan sekarang jatuh pada y_1 .

Ketidakeimbangan pada pasar komoditi agregat membawa kepada ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja agregat, yang mengakibatkan perusahaan "terlepas" dari kurva permintaan (tidak dapat menjual *output* yang dihasilkan oleh unit tenaga kerja n_f) mereka pada titik K. Terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, yaitu $n_f - n_1$ (pengangguran), dengan tingkat upah tetap di W_f . Sehingga, pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (GEI) terhadap pengangguran adalah negatif, yaitu jika terjadi peningkatan GEI, maka jumlah penganggur akan berkurang. Dampak tidak langsung GEI terhadap jumlah penganggur terlihat pada investasi, dimana jika terjadi penurunan GEI yang berakibat pada penurunan kondisi infrastruktur, maka investasi akan menurun. Penurunan investasi menyebabkan peningkatan jumlah penganggur.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan ragam penelitian yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel. Penelitian ini juga dapat didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antar variabel yang diuji melalui statistik korelasional (Gall, Gall dan Borg, 2003). Penelitian ini menggunakan data panel yang dikumpulkan dalam beberapa objek dengan beberapa waktu. Selanjutnya model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan dalam persamaan regresi berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + eit$$

Dimana:

Y_{it} = Penduduk Bekerja (variabel dependent) Kabupaten- pada tahun ke- (Ribu Jiwa/Tahun)

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

- X_1 = Tingkat pendidikan (Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut ijazah terakhir) satuan (Jiwa/Tahun)
- X_2 = Pembangunan Infrastruktur (PDRB atas harga dasar konstan menurut lapangan usaha Infrastruktur) satuan (Jutaan/Tahun)
- X_3 = Pembangunan Real Estate (PDRB atas harga dasar konstan menurut lapangan usaha Real Estate) satuan (Jutaan/Tahun)
- e_{it} = Error term

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data dengan karakteristik data panel adalah data yang berstruktur urut waktu sekaligus *cross section* (Ariefianto, 2012). Sebelum melakukan regresi data panel, terlebih dahulu dilakukan serangkaian uji untuk memilih pendekatan dalam analisis data panel. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel ini adalah *random effect*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *random effect* adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,21967 + 0,013670X_1 + 0,127182X_2 + 0,341686X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap angka serapan tenaga kerja sebesar 0,013670. Angka ini berada pada kondisi positif namun tidak signifikan. Pengaruh sektor infrastruktur terhadap serapan tenaga kerja sebesar 0,127182 juga positif dan tidak signifikan. Pengaruh sektor *real estate* terhadap serapan tenaga kerja sebesar 0,340686 berada pada posisi positif dan signifikan. Artinya setiap kenaikan pembangunan *real esatate* sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan serapan tenaga kerja sebesar 0,3%. Koefisien determinasi variabel independen menerangkan variabel dependen adalah sebesar 0,568264 atau sebesar 56,8%, untuk 43,2% data yang tidak dapat dijelaskan tidak menutup kemungkinan dimiliki variabel lainnya seperti upah, PDRB, inflasi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,8234 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,013670. Hasil ini memiliki

arti bahwa setiap kenaikan jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Papua Barat sebesar 1%, hanya akan menaikkan angka serapan tenaga kerja sebesar 0,013%.

Hasil ini bertentangan dengan teori *human capital* dimana seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui pendidikan. Alasan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam hal ini disebabkan membludaknya jumlah lulusan usia 15 tahun ke atas yang lulus tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang ada dan juga adanya tenaga kerja dari daerah lain yang mencari kerja di Provinsi Papua Barat. Sedangkan tingkat kualitas SDM lulusan yang ada di tiap kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat tidak sama.

Dalam ekonomi modern, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganie (2017) yang menyatakan orang berpendidikan rendah tetapi mendapatkan pelatihan (yang memakan priode lebih pendek dan sifatnya nonformal) akan memiliki produktifitas yang relatif sama dengan orang yang berpendidikan tinggi atau formal. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi maupun rendah tidak berbeda produktifitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama.

Sektor infrastruktur berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,2908 > 0,05 dengan koefisien sebesar 0,127182. Hasil ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan pembangunan sektor infrastruktur di Papua Barat sebesar 1%, hanya akan menaikkan angka serapan tenaga kerja sebesar 0,127%. Secara teoritis penelitian ini bertentangan dengan penelitian Willis (2015) dimana pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara teori, penelitian menunjukkan hasil yang bertentangan dengan pandangan Keynes dalam Dumairy (1997), yang mengungkapkan dengan adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak, maka suatu suntikan ke dalam pendapatan nasional akan menaikkan permintaan keseluruhan dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan kerja.

Hal yang menjadi argumentasi mengapa pembangunan sektor infrastruktur justru tidak

diiringi dengan serapan tenaga kerja yang sepadan adalah bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat lebih diutamakan untuk membuka isolasi daerah dan membangun konektivitas antardaerah. Pembangunan infrastruktur di Papua Barat belum diarahkan untuk meningkatkan perputaran ekonomi dengan adanya akses ke sumber daya seperti sumber daya alam yang pasti akan diikuti oleh *multiplier effect* serapan tenaga kerja.

Sektor *real estate* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar $0,0274 < 0,05$ dengan koefisien $0,340686$. Artinya jika sektor *real estate* meningkat 1% maka angka serapan tenaga kerja akan naik sebesar 0,34%. Secara teoritis penelitian ini mendukung teori Harrod Domard, bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan sendirinya berkaitan langsung dengan terciptanya lapangan kerja, investasi yang dilakukan berupa investasi (PMA dan PMDM) khususnya sektor infrastruktur.

Hasil ini sesuai dengan yang diungkapkan Murtianingsih (2005) terbukanya peluang bisnis properti secara otomatis memberikan peluang bagi bisnis-bisnis pendukung seperti konsultan, pialang, agen-agen properti dan industri yang menopang bisnis properti seperti industri semen, cat, besi, kayu, dan sebagainya, sehingga dengan bergairahnya suatu bisnis properti akan mampu meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Papua Barat.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, maka sejumlah kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Faktor tingkat pendidikan dalam penelitian ini ternyata berpengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil ini menjadi catatan tersendiri dimana dapat dimaknai bahwa kualifikasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Papua Barat ternyata tidak linear dengan kesempatan kerja yang tersedia.
2. Faktor infrastruktur yang diharapkan akan mampu menjadi penyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, ternyata pengaruhnya tidak signifikan walau koefisiennya positif. Hal ini bermakna bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat belum berkorelasi langsung dengan meningkatnya pertumbuhan sektor riil yang

banyak menyerap tenaga kerja. Kondisi ini dapat dimaklumi karena orientasi utama pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah untuk membuka isolasi daerah dan menyediakan aksesibilitas bagi masyarakat umum. Walaupun ada, namun orientasi untuk menjadi *multiplier effect* dalam perekonomian masih kecil.

3. Hanya faktor *real estate* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap serapan tenaga kerja di kabupaten/ kota di Papua Barat. Sebagai sektor yang paling banyak memiliki keterkaitan dengan bidang lain, *real estate* mampu menyerap tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dalam jumlah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Wibowo Hendra dan Diah Pujiati. (2011). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Real Estate Dan Property di Bursa Efek Indonesia (Bei) dan Singapura (Sgx). Jurnal, Vol. 1, No. 2, July 2011. Hal. 155 – 178.
- Aji, Satrio Billy. (2016). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Jumlah Lulusan SMA dan Investasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2004. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews. ERLANGGA. Jakarta.
- Atmanti, Hastarini Dwi. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. Dinamika Pembangunan. Vol 2 No. 1, (Journal.uns.ac.id).
- Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Provinsi Papua Barat. 2016. Papua Barat Dalam Angka 2015. Manokwari.
- Borg, W. R. & Gall, M. D. (2003). Educational research: an introduction (7th ed.). Longman Inc. New York.
- Dornbusch, R., Fischer, S. and Startz, R. (2008). Makro Ekonomi. PT Media Global Edukasi. Jakarta.
- Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gilarso, T. (1994). Pengantar Teori Ekonomi Mikro Jilid 1. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- M. Grahandaka. (2010). Pasar Properti Indonesia Beranjak Booming.

- Maulida, Y. dkk. (2014). Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan. JOM FEKON 1. No. 2.
- Mankiw, Gregory. (2012). Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta.
- Mulyadi, Subari. (2002). Ekonomi Sumber Daya Manusia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Murtiningsih, Siti. (2005). Analisis Dampak Guncangan Variabel Makro Terhadap Investasi Bisnis Properti di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, IPB. Bogor.
- Qomariyah, Isti. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Satria, Dian. (2008). Modal Manusia dan Globalisasi: Peran Subsidi Pendidikan, <http://www.diansatria.web.id/wp-content/uploads/2008/12/jurnalindesubsid i.pdf>
- Sukirno, Sadono. (2013). Makroekonomi: Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyudi, Ahmad. (2004). Ekonomi Pembangunan. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Zetha, E. & T. Tambunan. (2006). Laporan Ekonomi Bulan Agustus 2006. Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jakarta.
- Wilis, Retno, (2015). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan. El Dinar Vol 3, No 1.